



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JIAH PALUPI TWIHANTARTI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 767029

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.585.533.000**

1. Tanah Seluas 3510 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 3101 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 399 m2/100 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 196.500.000
4. Tanah Seluas 449 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 219.000.000
5. Tanah Seluas 1372 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 193.239.000
6. Tanah Seluas 1052 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 148.169.000
7. Tanah Seluas 119 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 78.625.000
8. Tanah Seluas 2715 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, WARISAN Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 592.000.000**

1. MOTOR, HONDA NC11BF1D A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11BFID A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000



3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G M/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	26.275.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.233.808.000

III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.233.808.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.